

**PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

RIFKAH WALIDAINI
NPM: 220012111144

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg.: 7/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Rifkah Walidaini
NPM : 2210012111144
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Pemenuhan Hak Warga Binaan yang Berkebutuhan
Khusus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas
II B Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing)

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, written over a horizontal line.

PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B PADANG

Rifkah Walidaini¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: rifkahhhwd11@gmail.com

ABSTRACT

Fulfillment of the rights of inmates with special needs is implemented based on the principles of human rights as regulated in the Correctional Law. Article 61 Paragraph (2) of the Correctional Law explains that inmates with special needs include the elderly, people with mental disabilities, people with chronic diseases, and women in reproductive function (breastfeeding). In practice, of the total number of 10 inmates with special needs, the fulfillment of rights is not optimal due to limited facilities and infrastructure, resources, and institutional coordination. The problems in this study: 1) Efforts of the Class II B Padang Women's Correctional Institution in optimizing the fulfillment of the rights of inmates with special needs, 2) Obstacles faced in fulfilling the rights of inmates with special needs. This study uses a sociological juridical approach. To answer the problem the author uses primary data and secondary data. Primary data is collected through interviews, and secondary data is collected through document studies. The collected data is analyzed qualitatively. The research results indicate that: 1) Fulfillment of rights has been attempted through health services, placement in vulnerable housing blocks, and the implementation of development programs with the support of external parties. 2) Limited facilities and infrastructure, health workers, prison officers, budget constraints, and overcapacity in the housing conditions are limited. Therefore, internal capacity building and resource support are needed to optimally fulfill the rights of inmates with special needs.

Keywords: Inmates, Special Needs, Women's Correctional Institutions

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menganut prinsip sebagai negara hukum yang berlandaskan hukum, seharusnya yang berperan sebagai pengendali pada tatanan kehidupan bernegara ialah hukum itu sendiri, bukan kekuatan politik maupun kepentingan ekonomi. Prinsip ini dalam bahasa Inggris konsep ini sering

diungkapkan dengan istilah “*the rule of law, not of man*”, yang berarti wewenang berada di tangan hukum, tidak pada perorangan.

Salah satu bentuk nyata penerapan prinsip negara hukum yaitu dengan memberikan jaminan atas pengakuan serta perlindungan terhadap hak dasar sebagai warga negara tanpa pengecualian. Indonesia menempatkan diri sebagai negara

yang mengutamakan nilai-nilai hak asasi manusia serta menghormati kebebasan dasar setiap individu.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan salah satu asas dalam pemasyarakatan adalah “proporsionalitas”, yaitu adanya perlakuan yang adil dan seimbang dengan memperhatikan kebutuhan, serta menyesuaikannya dengan hak dan kewajiban individu.

Dalam sistem pemasyarakatan, warga binaan hanya kehilangan kemerdekaan bergerak, sedangkan hak lainnya seperti hak atas kesehatan, perawatan, perlakuan manusiawi, serta perlindungan dari diskriminasi tetap harus dipenuhi.

Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Pemasyarakatan, terdapat kategori warga binaan berkebutuhan khusus, yaitu:

1. Anak;
2. Anak Binaan;
3. Wanita yang sedang dalam fungsi reproduksi;
4. Pengidap penyakit kronis;
5. Penyandang disabilitas; dan
6. Orang lanjut usia.

Pemenuhan hak terhadap WBP yang berkebutuhan khusus harus dipenuhi dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan perlakuan yang adil, manusiawi, dan tidak membedakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN YANG**

BERKEBUTUHAN KHUSUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B PADANG”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang dalam mengoptimalkan pemenuhan hak warga binaan yang berkebutuhan khusus?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang terhadap pemenuhan hak warga binaan yang berkebutuhan khusus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang dalam pemenuhan hak warga binaan yang berkebutuhan khusus.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang dalam pemenuhan hak warga binaan yang berkebutuhan khusus.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis.
2. Sumber Data
Sumber terdiri dari Sumber Data Empiris dan Sumber Data Sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara.

4. Teknik Analisis
Teknik analisis data menggunakan Analisa Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang dalam mengoptimalkan Pemenuhan Hak Warga Binaan yang Berkebutuhan Khusus

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang, diketahui bahwa pihak Lapas telah melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan hak warga binaan berkebutuhan khusus. Upaya tersebut dilakukan melalui pelayanan kesehatan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta penempatan hunian yang disesuaikan dengan kondisi warga binaan.

Dalam bidang pelayanan kesehatan, Lapas menyediakan fasilitas Klinik Pratama dengan tenaga kesehatan yang terdiri dari satu dokter umum, satu bidan, dan satu perawat. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala bagi warga binaan. Bagi warga binaan yang mengidap penyakit kronis seperti TBC, dilakukan pemeriksaan rutin setiap bulan bekerja sama dengan Puskesmas Anak Air serta diberikan pengobatan dan tambahan asupan gizi untuk mendukung proses pemulihan.

Bagi warga binaan lanjut usia, diberikan pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap minggu, pemberian obat secara berkala, serta tambahan gizi seperti susu lansia dan makanan tambahan. Meskipun telah tersedia blok hunian rentan, dalam praktiknya tidak semua warga binaan lansia bersedia menempatnya karena faktor

psikologis.

Sementara itu, bagi warga binaan perempuan dalam fungsi reproduksi seperti ibu hamil dan menyusui, diberikan layanan pemeriksaan kehamilan oleh bidan serta rujukan ke fasilitas kesehatan luar ketika proses persalinan. Ibu menyusui juga memperoleh tambahan susu, sedangkan bayi yang berada di dalam Lapas mendapatkan imunisasi dan pemantauan kesehatan secara berkala.

Dalam penanganan warga binaan penyandang disabilitas mental, pihak Lapas melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan luar karena keterbatasan tenaga psikolog di dalam Lapas. Pengawasan terhadap warga binaan tersebut juga dilakukan secara lebih intensif oleh petugas.

Selain itu, warga binaan berkebutuhan khusus ditempatkan pada blok hunian tertentu agar lebih mudah dalam pengawasan dan pemberian layanan. Dalam bidang pembinaan, mereka tetap dilibatkan dalam kegiatan pembinaan mental, rohani, serta pelatihan keterampilan dengan menyesuaikan kondisi masing-masing. Lapas juga menjalin kerja sama dengan instansi eksternal dalam mendukung pelayanan kesehatan dan program pembinaan.

B. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan yang Berkebutuhan Khusus

1. Keterbatasan sarana dan prasarana.
2. Minimnya jumlah dan jenis tenaga kesehatan.
3. Kelebihan kapasitas

- (*Overcrowding*).
4. Keterbatasan Anggaran Pemenuhan Kebutuhan Khusus
 5. Keterbatasan Jumlah Petugas Pemasarakatan
 6. Ketergantungan pada Pihak Eksternal

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemenuhan hak warga binaan berkebutuhan khusus di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Padang telah dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan, penempatan hunian rentan, serta pembinaan dengan dukungan kerja sama eksternal. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih dominan bersifat kuratif dan belum didukung pendekatan promotif serta preventif yang berkelanjutan.
2. Kendala utama berupa overkapasitas hunian, keterbatasan anggaran, fasilitas, serta tenaga medis dan petugas pamasarakatan berdampak pada belum maksimalnya kualitas pelayanan dan pembinaan, sehingga diperlukan penguatan kapasitas dan dukungan sumber daya yang lebih terencana.

B. Saran

Melalui simpulan tersebut, terdapat saran yaitu:

1. Peningkatan SDM terkait dengan tenaga kesehatan dan tenaga ahli untuk mendukung layanan pamasarakatan.
2. Penambahan anggaran di lingkungan pamasarakatan.
3. Optimal koordinasi antar lembaga penegak hukum dan sosial

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sunggono. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Depok. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Nomor 22 Tahun 22 tentang Pemasarakatan

Sumber lain

Rahmansyah Fadlul Al Karim, dkk. Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2024, Vol.11. No.1.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.
3. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum.